

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Ritel	18
1. Pengertian Ritel	18
2. Ritel Modern	22
3. Pasar Tradisional	29
B. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat	33
1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	33
2. Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha	33
3. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha	34
a. Perjanjian Yang Dilarang	34
b. Kegiatan Yang Dilarang	34
c. Posisi Dominan Dan Penyalahgunaannya	35

d. <i>Merger</i> (Penggabungan) Yang Bersifat Anti Persaingan	36
4. Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Hukum Persaingan	
Usaha	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	38
1. Pemerintahan Daerah	38
2. Pemerintah Daerah	39
3. Peraturan Daerah	39
D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Dan Intervensi	
Pemerintah	40
1. Kebijakan Publik	40
2. Kebijakan Sebagai Keputusan	40
3. Kebijakan Sebagai Intervensi Pemerintah	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	43
2. Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	44
C. Jenis Bahan Hukum	44
1. Bahan Hukum Primer	44
2. Bahan Hukum Sekunder	46
3. Bahan Hukum Tersier	47

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	48
F. Definisi Konseptual	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Analisis Prinsip Asas Keseimbangan Kepentingan Pelaku Usaha Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Hukum Persaingan Usaha	51
1. Gambaran Umum Persaingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Di Indonesia	51
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	60
3. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2000	66
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007	68
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008	71
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013	72
7. Hukum Persaingan Usaha Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah	75
B. Analisis Pengaturan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Di Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Kota Malang	79
1. Di Kota Malang	79
2. Di Kota Surakarta	84
C. Model Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Kota Malang Dalam	

Menjamin Kepastian Kesempatan Berusaha Yang Sama Antara

Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional 89

BAB V PENUTUP 97

A. Kesimpulan 98

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 100

Lampiran

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Modern

